

**PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)
DALAM MENCEGAH BRIDE TRAFFICKING DI INDIA
TAHUN 2011-2014**

Oleh:

Sari Eza Darma

Email: Sarieza_darmadaik@yahoo.co.id

Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP. M.Si.

**Bibliografi: 13 Jurnal, 12 Buku, 15 Dokumen Resmi, 4 Skripsi, 9 Media
Masa, 60 Internet**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is a study of contemporary which discussing about the role of the United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) in Preventing Bride Trafficking in India. Bride Trafficking is not a new phenomenon in India. This practice is known as the Bride Buying in past time. Bride Trafficking is one form of human trafficking that make women and girls (brides) as victims on behalf of marriage and sold from one person to another only as sex objects. Victims generally come from poor families and vulnerable to rape, abuse, social discrimination, physical and psychological violence. Bride Trafficking occurs between regions in India but several victims also come from other countries such as Bangladesh.

In this research, the author uses the group behavior analysis level which focused on the role of international organization. This research uses a pluralist perspective in international relations and organizational theory of Clive Archer. UNODC's role in preventing Bride Trafficking in India by 3P program (Prevention, Protection and Prosecution).

In effort to prevent Bride Trafficking in India, UNODC faced some obstacles. The lack of public knowledge about the dangers of Bride Trafficking, lack of resource capacity in India and lack of monitoring and evaluation of the Indian government so that the victims of Bride Trafficking increased from year to year.

Keywords: *Bride Trafficking, Human Trafficking, the United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC), Prevention, Protection, Prosecution.*

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang peran *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam mencegah *Bride Trafficking* di India. *Human Trafficking* adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, pengekangan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun didalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹ *Human Trafficking* bukan hal yang baru dalam studi ilmu hubungan internasional. *Human Trafficking* masih terjadi meski telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah *Human Trafficking*.

Human Trafficking atau yang lebih dikenal dengan perdagangan manusia terbagi atas beberapa bentuk yaitu *Woman Trafficking*, *Sex Trafficking* dan *Child Trafficking* yang merupakan bagian dari *Human Trafficking* yang menjadikan wanita dan anak-anak sebagai korbannya. Istilah yang baru dikenal yaitu *Bride Trafficking*. *Bride Trafficking* merupakan cabang dari *Human Trafficking* dengan kedok pernikahan dalam praktiknya. *Bride Trafficking*

adalah salah satu kejahatan terorganisir dengan wanita dan anak perempuan (pengantin) diperdagangkan dengan mengatasnamakan pernikahan dan dijual dari satu orang ke orang lain yang berujung kepada bentuk lain dari kejahatan seperti pemerkosaan, perbudakan dan pelecehan di antara pengantin yang telah dibeli.² Korban *Bride Trafficking* adalah wanita dan anak perempuan dari kalangan keluarga miskin yang diiming-imingi dengan janji palsu dan kehidupan pernikahan yang bahagia.

India merupakan salah satu negara dengan beraneka ragam kultur dan budaya, beberapa kawasan di India masih memegang teguh terhadap nilai tradisi yang menyatakan bahwa anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan anak perempuan sehingga ketidakseimbangan jender masih terjadi di India. Pada tahun 2011, data *sex ratio* dari sensus India menunjukkan bahwa ada sekitar 914 anak perempuan yang berusia 0-6 tahun untuk setiap 1000 anak laki-laki pada usia yang sama.³ Sebuah studi oleh NGO *Drishti Stree Adhyayan Prabodhan Kendra* menemukan lebih dari 10.000 keluarga dimana 9000 dari wanita menikah di Haryana dibeli dari wilayah lain kemudian dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa 92

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 1.

² *Bride Trafficking-Poor Paros of India, living sub-par lives*. Diakses dari <http://www.indianmutinies.com/bride-trafficking-shafiq-rahman/> pada tanggal 30 september 2015

³ *Bride Trafficking in India*. Diakses dari situs resmi www.dfn.org.uk/bridetrafficking pada tanggal 21 September 2015

desa dari wilayah Mahendragarh, Sirsa, Karnal, Sonapat dan Mewat mengatakan bahwa hampir semua masyarakat menerima *Bride Trafficking* sebagai praktek yang biasa terjadi.⁴ Tradisi yang mengatakan bahwa anak laki-laki lebih disukai menyebabkan kurangnya wanita di beberapa kawasan di India sehingga para pria kesulitan untuk mendapatkan istri yang mengakibatkan terjadinya *Bride Trafficking*.

Bride Trafficking memberikan dampak negatif kepada para korban. Korban diperdagangkan, dinikahkan atau dipaksa menikah dan dijual kembali dari satu orang ke orang lain. Korban diperlakukan tidak lebih baik dari seorang budak, rentan menerima kekerasan fisik dan psikis, hanya diperbolehkan bekerja di sektor domestik, memasak untuk keluarganya, merawat orang tua suami yang sakit, dan kemudian ketika suami korban meninggal, korban ditendang keluar dari rumahnya bersama dengan anak-anaknya. Sebuah budaya yang patriarki, ketidakseimbangan gender yang tinggi dan meningkatnya permintaan mas kawin, membuat *Bride Trafficking* terjadi daerah ini.⁵ Para korban sering tidak menyadari bahwa korban telah diperdagangkan. Para pelaku perdagangan ini sering

terhindar dari tangkapan polisi karena korban jarang mengajukan keluhan tentang perlakuan buruk dari suaminya, jauh dari rumah dan kurangnya dukungan sosial serta korban rentan menerima kekerasan sosial dimana wanita yang ditinggal suami atau janda akan mendapatkan hinaan dari lingkungan sosial.

Berdasarkan *India's National Crime Record Biro* (NCRB), pada tahun 2012 sekitar 22.000 wanita diculik untuk dinikahkan dan pada tahun 2013 hampir 40% dari semua penculikan perempuan di India yaitu untuk tujuan dinikahkan, sekitar 31.000 perempuan diculik dengan maksud memaksa korban untuk menikah serta lebih dari 1.500 orang diculik dengan maksud untuk motif pembunuhan.⁶ India saat ini terkenal dengan kemajuannya di bidang industri namun ternyata di beberapa kawasan India masih terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terutama bagi wanita dan anak-anak. *Bride Trafficking* merupakan pelanggaran hak asasi manusia serius dimana korban dari kasus ini kehilangan hak untuk berpendidikan, hak non-diskriminasi dan hak hidup bebas dari kekerasan dan eksploitasi.

Bride Trafficking merupakan suatu kejahatan transnasional dikarenakan kasus *Bride Trafficking* di India ini tidak hanya terjadi dalam kawasan India saja melainkan Bangladesh merupakan salah satu negara sumber korban dari kejahatan ini. Data dari *National Crime Record Biro* (NCRB) diatas memberikan

⁴ United Nation Office on Drugs and Crime. *India Country Assessment Report: Current status of Victim Service Providers and Criminal Justice Actors in India on Anti Human trafficking*. Hal 11

⁵ *When a Bride-to-Be Is a Bride to Buy*. Diakses dari <https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2015-05-22/when-bride-be-bride-buy> pada tanggal 30 september 2015

⁶ *Close to 40% of all abductions are of women for marriage: NCRB*. Diakses dari <http://cabt.empowerpeople.org.in/2015/08/close-to-40-of-all-abductions-are-of.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2015

fakta bahwa *Bride Trafficking* masih terjadi di India pada tahun 2012 dan 2013, meskipun India telah meratifikasi beberapa konvensi regional maupun internasional untuk mengatasi masalah ini namun *Bride Trafficking* masih terjadi di India. Pengetahuan akan bahaya dari *Bride Trafficking* ini sangat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam fenomena ini.

Berkembang pesatnya fenomena *Bride Trafficking* di India yang merupakan salah satu bentuk dari *Human Trafficking* membuat organisasi internasional UNODC ikut andil dalam mengatasi fenomena *Bride Trafficking* di India. Salah satu langkah yang diambil UNODC dalam mengatasi *Bride Trafficking* adalah membuat konvensi yaitu *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Konvensi UNTOC terdiri dari 3 protokol dimana salah satu protokol yaitu protokol pertama membahas tentang (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children*) pencegahan, penekanan dan hukuman perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. India telah meratifikasi konvensi tersebut pada bulan mei tahun 2011. Dalam program untuk melindungi setiap korban *Bride Trafficking* dari kekerasan fisik, psikis dan sosial, UNODC bekerjasama dengan Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak serta Pemerintah India dalam melaksanakan proyek dukungan korban untuk mengatasi kebutuhan psiko-sosial perempuan di rumah perawatan di beberapa wilayah India.

Kerangka Teori

Penulis menggunakan perspektif pluralisme dalam penelitian ini. Perspektif pluralisme merupakan perspektif atau *grand theory* yang membahas isu-isu mengenai kebebasan, modernisasi, globalisasi, aktivitas transnasional, peran aktor negara, penyebaran prinsip pasar bebas kapitalisme dan demokrasi, isu HAM, interpedensi dan ide pembentukan organisasi internasional dan MNC's, kerjasama internasional dan isu-isu lainnya. Awalnya, aktor dalam hubungan Kaum pluralism memandang bahwa tidak hanya negara yang bisa mempengaruhi politik dunia secara langsung tetapi juga aktor non-negara bisa berperan banyak.⁷ Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tetapi merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Empat asumsi dari perspektif pluralisme adalah:⁸

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintah, MNCs, kelompok ataupun individu.

⁷

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/362/jbp_tunikompp-gdl-arlindamay-18076-4-babii.pdf diakses pada tanggal 28 oktober 2015

⁸ M.Saeri, 2012, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional, Vol.3 No.2, Hlm 15

2. Negara bukanlah *unitary actor* atau aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.
3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara.
4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada power atau national security, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep peran. Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu baik itu posisi dalam organisasi maupun dalam sikap Negara.⁹ Dalam studi hubungan internasional, konsep peranan bisa dijadikan untuk menjelaskan bagaimana perilaku aktor internasional, baik individu maupun organisasi dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam sistem internasional. Konsep peranan dalam studi hubungan internasional tidak hanya membahas tentang permasalahan negara saja, tetapi juga membahas semua masalah yang terjadi di dunia internasional.

Penulis menggunakan teori organisasi internasional dalam penelitian ini, menurut Clive Archer menjelaskan bahwa peranan

organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:¹⁰

a. Sebagai instrument

Peran pertama dari organisasi internasional adalah sebagai instrument digunakan oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO, dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Peranan organisasi internasional sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan nasional suatu negara. Gambaran dari organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organisasi internasional itu bertujuan untuk memenuhi setiap kepentingan anggotanya. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

b. Sebagai arena

Organisasi internasional merupakan tempat bertemu anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi para anggotanya untuk berkumpul bersama-sama berdiskusi, berdebat, bekerjasama, maupun saling berbeda pendapat. organisasi internasional menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih

⁹ Mochtar Mas'oed. Op.cit. Hlm. 45

¹⁰ Clive Archer, 1983, *International Organization*, London : Allen&Unwid Ltd, Hlm 136

meningkatkan pandangan dimana hal seperti ini tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral.

c. Sebagai aktor independen

Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Archer menyatakan organisasi internasional sebagai aktor yang dapat bertindak sesuai dengan kemauannya, sehingga dapat dilihat apakah organisasi internasional tersebut bersifat otonom atau tidak.

Pembahasan

India merupakan negara yang saat ini menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang maju pesat. Pertumbuhan ekonomi India semakin pesat namun masalah kemiskinan masih meluas di daerah-daerah pedalaman yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan korupsi yang merajalela, bentuk baru perbudakan yaitu *Bride Trafficking* telah berkembang. Wanita dan anak perempuan dijual kepada pria-pria yang hanya menjadikannya sebagai objek seks yang sering disiksa dan membebani mereka dengan kerja-kerja berat. Di negara di mana anak-anak perempuan dianggap sebagai beban keuangan, aborsi bayi perempuan banyak dilakukan yang telah menyebabkan ketidakseimbangan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki dan para ahli mengatakan ini telah mendorong terjadinya *Bride Trafficking*.¹¹ India

¹¹ Variation on slavery: bride trafficking, India 2011
<http://www.womensviewsonnews.org/2011/11/variation-on-slavery-bride-trafficking->

memang saat ini terkenal dengan perekonomian yang maju namun seperti negara lain, India masih menghadapi banyak masalah seperti kemiskinan dan masalah kemanusiaan.

Sex Ratio pria-wanita telah meningkat dalam 80 tahun terakhir. Pada tahun 1911, jumlah penduduk perempuan 780 perempuan terhadap 1.000 pria kemudian meningkat pada tahun 1921 menjadi 799 jumlah perempuan terhadap 1.000 pria dan meningkat ke 882 pada tahun 1991. Pada tahun 2001, *sex ratio* menurun menjadi 874 perempuan dari 100 laki-laki yang menyebabkan terjadinya *Bride Trafficking* dikalangan penduduk miskin seperti petani miskin atau dari golongan kasta rendah.¹² Ketidakseimbangan jender yang terjadi di India menyebabkan ketidakseimbangan jumlah penduduk pria dan wanita di India sehingga kebanyakan para pria kesulitan untuk mencari pasangan hidup, *Bride Trafficking* merupakan jalan satu-satunya untuk menemukan istri dari luar wilayah.

Pengantin yang diperdagangkan biasanya berusia 13-23 tahun, 56% dari pengantin yang diperdagangkan telah dijual sebanyak 2 kali, 21% sebanyak 3 kali dan 6% sebanyak 4 kali.¹³ *Bride*

india-2011/#sthash.bAVjL1QN.dpuf diakses pada tanggal 5 Desember 2015

¹² Bride-buying an old practice in north India.
<http://www.tribuneindia.com/2003/20030818/main8.htm> pada Tanggal 5 Desember 2015

¹³ Sex, lies, and a receipt: Bride trafficking lifts it head from under the veil.
<http://www.thealternative.in/society/sex->

Trafficking yang terjadi di India, 90% terjadi antar wilayah di India dan 10% terjadi antara negara lain. Para korban dari *Bride Trafficking* biasa dibeli dari beberapa kawasan miskin di India seperti Assam, Bihar, Jharkhand, Undivided Andhra Pradesh, Bengal Barat, Orissa, Kerala dan Maharashtra dan dijual ke kawasan Haryana, Punjab, Uttar Pradesh bagian barat, dan Rajasthan bahkan korban juga berasal dari negara lain yaitu Bangladesh.

Bride Trafficking merupakan salah satu bentuk *Human Trafficking* yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia didalamnya. Dilihat dari skema terjadinya *Bride Trafficking* ini yaitu penipuan dan pemaksaan yang berujung kepada pelanggaran HAM, *Bride Trafficking* memberikan banyak sekali dampak negatif bagi korbannya.

1. Diskriminasi Sosial

Paro atau Molki adalah sebutan kasar atau mengejek terhadap wanita korban *Bride Trafficking* dimana Paro atau Molki berarti 'wanita yang dibeli untuk beberapa dolar'. Kata 'paro' dan 'molki' terkenal didaerah seperti Haryana, Punjab, barat Uttar Pradesh dan Rajasthan. Paro atau Molki merupakan panggilan untuk wanita yang bukan hanya wajib menikahi saudara laki-laki dari suaminya setelah kematian suaminya melainkan dia juga wajib memiliki hubungan seksual dengan saudara-

lies-and-a-receipt-bride-trafficking-lifts-it-head-from-under-the-veil/ diakses pada tanggal 6 Desember 2015.

saudaranya meskipun suaminya masih hidup.¹⁴ Paro atau Molki dapat dikatakan sebagai wanita yang melayani lebih dari satu suami. Kebanyakan paro atau molki tidak mendapatkan pengakuan di kehidupan sosial. Mayoritas anggota panchayat (73%) dan pemangku kepentingan lainnya (72%) mengatakan bahwa perempuan ini tidak diterima secara sosial sehingga paro atau molki tidak berpartisipasi dalam adat istiadat setempat. 71% dari wanita molki tegas ditolak untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan hanya berpartisipasi dalam keluarga.¹⁵ Sehingga wanita korban dari *Bride Trafficking* ini mendapatkan diskriminasi di kehidupan sosial

2. Hilangnya hak-hak dasar perempuan

Korban dari *Bride Trafficking* ini selain tidak mendapatkan peran di kehidupan sosial, dalam kehidupan keluarga korban sering tidak mendapatkan pengakuan sebagai istri pada umumnya. Pernikahan dianggap sebagai perpaduan budaya dari dua keluarga dan masyarakat akan tetapi dalam kasus wanita molki, tidak ada bukti pencampuran budaya di keluarga, wanita molki dianggap orang asing dalam keluarga sehingga korban tidak berani untuk

¹⁴ Paro or Molki : An abusive word. <http://www.empowerpeople.org.in/paro-or-molki--an-abusive-word.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2015

¹⁵ Molki Women: is it Marriage..... ?. <http://bringtoanend.blogspot.co.id/2009/12/molki-women-is-it-marriage.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2015.

memperkenalkan salah satu budaya mereka. Paro atau Molki hanya digunakan sebagai komoditas seks belaka, mereka tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dalam setiap pemecahan masalah dalam keluarga, hanya boleh bekerja disektor domestik saja atau dijadikan pekerka di lading, merawat orang tua suami yang tua dan sakit dan tidak diizinkan untuk berbicara atau pulang kerumah orang tua.

3. Rentan menerima kekerasan fisik dan psikis

Korban dari *Bride Trafficking* selain menerima diskriminasi sosial biasanya rentan menerima kekerasan fisik dan psikis. Korban biasanya tidak diterima sebagai istri dikeluarga suami sehingga mereka hanya dijadikan komoditas seks dan digunakan sebagai pekerja-pekerja di ladang. Di rumah mereka sering menerima kekerasan dan tindakan eksploitasi dari suami maupun keluarga jika korban tidak mengikuti kemauan keluarga suami tersebut. Mereka juga harus mau menikahi saudara laki-laki apabila suami mereka telah meninggal jika tidak mereka akan disiksa dan dijual kembali kepada lelaki lain. Kebanyakan korban yang selamat tidak pernah melaporkan kasus ini kepada polisi karena takut akan diteror oleh keluarga suami dan di kehidupan sosial, wanita yang menjadi janda atau dibuang oleh suami mereka akan dianggap sebagai wanita sampah.

Bride Trafficking merupakan praktik ilegal yang memberikan banyak negatif kepada wanita dan anak perempuan yang menjadi

korbannya. Belum ada data yang pasti tentang berapa banyak kasus *Bride Trafficking* di India. Menurut Shafiqur Rahman, pendiri *Empower People*, di beberapa kasus, orang tua korban merupakan korban dari penipuan yang menikahkan anak mereka tanpa harus membayar mahar dan di beberapa kasus orang tua dengan sengaja menjual anak mereka karena tuntutan ekonomi yang rendah serta kebanyakan kasus dari *Bride Trafficking* adalah korban dari penculikan untuk tujuan menikah.¹⁶ Kebanyakan korban *Bride Trafficking* adalah korban dari penculikan untuk tujuan dinikahkan.

Tabel 3.3 data dari jumlah penculikan di India dari tahun 2010-2014

Sensus	Total	For Marriage	Other
2010	39.148	18.354	20.795
2011	45.239	22.050	23.189
2012	48.219	24.681	23.538
2013	66.441	30.139	36.302
2014	78.448	31.040	47.408

Sumber: *India's National Crime Record Biro*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, kasus penculikan untuk tujuan menikah mengalami peningkatan 71% dari tahun 2010-2014. Dari semua kasus penculikan, sekitar 40% merupakan penculikan untuk tujuan menikah.¹⁷

¹⁶ "Parents are victims of fraud who marry their daughters to the 'dilliwahs' because they do not ask for dowry" http://www.theeasternpost.org/print_news.php?n_id=992&of_id=5 diakses pada tanggal 6 Desember 2015

¹⁷ Abduction of Women for Marriage Is on the Rise in India. <http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2015/0>

Sebagai perbandingan, 83 orang dilaporkan telah diculik untuk menikah selama tahun itu. Angka-angka NCRB untuk 2014 menunjukkan bahwa pengadilan menghukum 3.167 orang untuk penculikan perempuan untuk memaksa mereka untuk menikah.¹⁸ Berdasarkan data yang didapat memberikan bukti bahwa *Bride Trafficking* termasuk kedalam kejahatan yang melanggar hak-hak asasi perempuan.

Banyak kebijakan dan peraturan yang telah dilakukan oleh pemerintah India dalam mengurangi kasus-kasus kemanusiaan di India. Undang-undang yang menghapus praktik mahar yang sering mendiskriminasi dan merugikan wanita telah dilarang sementara belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai *Bride Trafficking* di India. *India Panel Code section 366* merupakan undang-undang yang membahas tentang *Bride Trafficking* namun implementasi dari undang-undang tersebut belum efektif terlihat dari jumlah korban *Bride Trafficking* meningkat dari tahun ke tahun.

Kasus kejahatan yang masih berkembang terjadi di India, menjadikan UNODC yang merupakan organisasi dibawah naungan PBB yang fokus untuk mencegah segala bentuk kejahatan memberikan perhatiannya untuk mencegah segala bentuk perdagangan manusia termasuk

Bride trafficking di India. Peran UNODC dalam mencegah *Bride Trafficking* di India tidak lepas dari kerjasama dengan pemerintah India, NGO lokal dan masyarakat India. Pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari *Bride Trafficking* harus dimiliki setiap masyarakat India. Program 3P (Pencegahan, Perlindungan dan Penuntutan) merupakan program yang dilakukan UNODC dalam mencegah *Bride Trafficking* di India.

1. Pencegahan (*Preventing*)

Dalam program pencegahan (*Preventing*), Organisasi Internasional UNODC melakukan kampanye #IGiveHope. Tanggal 30 Juli merupakan *the United Nations World Day against Trafficking in Persons*. Untuk menandai hari istimewa ini, UNODC mendorong orang di seluruh dunia untuk mengungkapkan solidaritas mereka dengan jutaan korban perdagangan manusia dengan memberikan kembali apa yang telah dicuri dari korban yaitu HARAPAN.¹⁹ Kampanye #igivehope merupakan kampanye yang dipelopori oleh UNODC untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang bahaya dari *Human Trafficking* dan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menunjukkan solidaritasnya kepada para korban yang paling terpengaruh oleh kejahatan ini. Kampanye #igivehope ini pertama kali dilakukan pada tahun 2014. Pada tahun 2015, UNODC melakukan kampanye #igivehope kembali untuk

8/20/abduction-of-women-for-marriage-is-on-the-rise-in-india/ diakses pada tanggal 6 Desember 2015

¹⁸ ibid

¹⁹ World Day Against Trafficking in Persons diakses dari <http://www.unodc.org/endht/> pada tanggal 21 Desember 2015

mendorong orang di seluruh dunia untuk mengambil bagian dalam kampanye ini dan berbagi dengan teman-teman mereka, keluarga dan masyarakat melalui media sosial menjelang *the 2015 World Day against Trafficking in Persons* pada tanggal 30 Juli.

Organisasi Internasional UNODC melakukan penelitian langsung tentang kejahatan ini ke negara India selama 10 bulan (Maret-Desember 2012) dan pada tahun 2013 menerbitkan hasil dari penelitian tersebut dalam laporan UNODC yaitu *India Country Assessment Report: Current Status Of Victim Service Providers And Criminal Justice Actors On Anti Human Trafficking* sehingga masyarakat internasional khususnya India mengetahui bahaya dari *Bride Trafficking*.

UNODC telah menggerakkan Initiative Global untuk Memerangi Perdagangan Manusia (UN-GIFT) yang dirancang untuk dampak jangka panjang untuk membuat titik balik dalam perang dunia melawan perdagangan manusia.²⁰ UN.GIFT merupakan kerjasama antara beberapa organisasi internasional dibawah naungan PBB dalam upaya untuk memerangi segala bentuk perdagangan manusia yang menyebabkan eksploitasi secara global. *Bride Trafficking* di India merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang menjadikan pengantin sebagai korbannya. UN.GIFT ikut

²⁰ UNODC. 2008. *INDIA COUNTRY REPORT: To Prevent and Combat Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children and Women*. New Delhi. UNODC ROSA. Hal 38.

mempromosikan fenomena *Bride Trafficking* di India untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang bahaya dari *Bride Trafficking* di India. Pada Mei 2011, UN.GIFT mempromosikan salah satu NGO India yang bekerja fokus dalam mencegah terjadinya *Bride Trafficking* di India yaitu *Empower People*.²¹ Dalam menjalankan misinya, UN.GIFT memberikan pengetahuan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dunia yang menyebabkan kejahatan transnasional terorganisasi.

2. Perlindungan (*Protection*)

Program perlindungan merupakan salah satu program yang diberikan oleh UNODC dalam mencegah *Bride Trafficking* di India. Organisasi Internasional UNODC menyediakan berbagai alat dan sumber daya untuk melindungi korban dan saksi kejahatan yang dapat terancam oleh kegiatan kriminal lain. Pada tahun 2011, UNODC mengeluarkan *Psychosocial Care For Women In Shelter Homes* yang merupakan panduan bagi pemberi perawatan di rumah singgah.²² Panduan ini merupakan kerjasama UNODC dengan Kementerian Perempuan dan

²¹ Bisa dilihat di Empower People, combating bride trafficking in India dari <http://www.ungift.org/knowledgehub/stories/may2011/empower-people-combating-bride-trafficking-in-india.html> pada tanggal 24 Desember 2015

²² UNODC. *Psychosocial Care For Women In Shelter Homes* diakses dari http://www.unodc.org/documents/southasia/Trainingmanuals/Psychosocial_care_for_women_in_shelter_homes.pdf pada tanggal 21 Desember 2015

Perkembangan Anak (*the Ministry of Women and Child Development*), Pemerintah India dan *the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences* (NIMHANS) di Bangalore, India. Panduan ini menjadi buku sumber daya yang sangat berguna untuk semua organisasi yang menyediakan perawatan institusional bagi perempuan dalam keadaan sulit terutama yang diselamatkan dari perdagangan atau kejahatan lainnya. Sejak dikeluarkan panduan *Psychosocial Care For Women In Shelter Homes* pada tahun 2011 sampai Januari 2012, lebih dari 700 karyawan yang bekerja di rumah penampungan pemerintah yang dikelola untuk wanita di negara bagian Andhra Pradesh, Karnataka dan Tamil Nadu telah dilatih tentang standar minimum perawatan dan perlindungan dan dukungan psiko-sosial di rumah singgah.²³ Organisasi Internasional UNODC sejauh ini telah membantu lebih dari 1.200 anak-anak di rumah singgah dan memberikan layanan konseling untuk 200 anak-anak.²⁴ Memberikan bantuan berupa pelatihan kepada korban dan panduan bagi perawat di rumah singgah merupakan langkah maju dalam program perlindungan (*prevention*) bagi korban kejahatan perdagangan manusia termasuk *Bride Trafficking*.

²³ India: Psychosocial care for women in shelter homes - a dire need for trafficking survivors diakses dari <https://www.unodc.org/southasia//frontpage/2012/January/psychosocial-care-for-women-in-shelter-homes.html> pada tanggal 21 Desember 2015

²⁴ *Prevention of Human Trafficking*. Op.Cit.

Organisasi Internasional UNODC juga bekerjasama dengan beberapa NGO di India yaitu Bachpan Bachao Andolan (BBA), salah satu NGO yang bekerjasama dengan UNODC adalah Bachpan Bachao Andolan (BBA). Pada tahun 2009, BBA mengembangkan *a Standard Operating Procedure on Investigation of Crimes of Trafficking for Forced Labour* yang bekerjasama dengan pemerintah India dan UNODC. Antara April 2011 dan Maret 2012, 751 anak-anak direhabilitasi melalui Mukti Ashram (pusat rehabilitasi jangka pendek di Delhi).²⁵ Kerjasama UNODC dengan NGO lokal lainnya adalah bekerjasama dengan *Action against Trafficking and Sexual Exploitation of Children* (ATSEC), salah satu jaringan anti perdagangan manusia tertua yang berdiri sejak tahun 1998 di Wilayah Asia Selatan. ATSEC adalah jaringan pertama di Asia Selatan dan organisasi berbasis komunitas (lebih dari 500 komunitas) dari seluruh negara yang memerangi perdagangan melalui jaringan yang luas pada pencegahan, perlindungan dan penuntutan. ATSEC tersebar di lima negara yaitu Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka dan India.

3. Penuntutan (*Prosecution*)

Organisasi internasional UNODC mendukung negara dalam menuntut pedagang dan penjahat lainnya dengan menyediakan bantuan legislatif untuk mendorong penyidikan dan penuntutan, dan pelatihan, buku pegangan dan alat-

²⁵ UNODC. 2013. *INDIA COUNTRY ASSESSMENT REPORT: CURRENT STATUS OF VICTIM SERVICE PROVIDERS AND CRIMINAL JUSTICE ACTORS ON ANTI HUMAN TRAFFICKING*. op.cit. Hal 164

alat lain untuk penegakan hukum dan pejabat peradilan pidana. Organisasi internasional UNODC mengeluarkan konvensi perdagangan manusia dan memaksa setiap negara anggota untuk meratifikasi konvensi tersebut. Pada bulan Mei 2011, Pemerintah India meratifikasi *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan tiga protokolnya sebagai langkah maju dalam melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.²⁶

Dalam program jangka panjang, Pada tahun 2008, UNODC mengeluarkan *Manual for Training Police Government of India On Anti Human Trafficking*. Pedoman untuk pelatihan polisi tentang *Anti Human Trafficking* (AHT) adalah bagian dari serangkaian alat yang dibuat oleh UNODC ROSA dalam proyek *anti human trafficking project* (IND/S16) yang sedang dijalankan yang bekerjasama dengan Pemerintah India, Departemen Dalam Negeri dan badan-badan pemerintah negara serta mitra masyarakat sipil dan sepenuhnya didanai oleh pemerintah AS. Pedoman ini berfokus pada kebutuhan pelatih polisi yang telah didukung oleh UNODC, dan disiapkan oleh *Gender Training Institute* (GTI) dari Pusat Penelitian Sosial (CSR), New Delhi.

²⁶ India: Significance of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) to address human trafficking diakses dari <https://www.unodc.org/southasia//frontpage/2011/june/significance-of-the-untoc-to-address-human-trafficking-interview-with-mr-g-k-pillai.html> pada tanggal 21 Desember 2015

Organisasi internasional UNODC sejauh ini telah melatih 13.490 aparat penegak hukum di India, mendirikan 9 unit anti perdagangan manusia di beberapa kabupaten di India dan mengembangkan 12 publikasi pelatihan.²⁷ Organisasi Internasional UNODC menyediakan pelatihan untuk lembaga penegak hukum di India untuk memperkuat kapasitas dan investigasi keterampilan teknis untuk mengatasi perdagangan manusia secara efektif berdasarkan *Manual for Training Police Government of India On Anti Human Trafficking*.

Kesimpulan

Bride Trafficking merupakan salah satu bentuk dari perdagangan manusia yang menjadikan 'pengantin' sebagai korbannya yang dijanjikan kehidupan pernikahan yang bahagia, umumnya yang menjadi korban adalah keluarga miskin. Diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita rentan terjadi di India terutama di pedesaan India akibat dari Tradisi. Penipuan, penculikan, pemaksaan untuk tujuan menikah merupakan cara-cara yang dilakukan *Trafficker* untuk menjerat korbannya. Kekerasan fisik, psikis, hilangnya hak-hak dasar dan diskriminasi sosial maupun lingkungan dialami oleh korban *Bride Trafficking*.

Banyak kebijakan dan peraturan yang telah dilakukan oleh pemerintah India dalam mengurangi kasus-kasus kemanusiaan di India. Undang-undang yang menghapus praktik mahar yang sering

²⁷ Prevention of Human Trafficking. op.cit.

mendiskriminasi dan merugikan wanita telah dilarang sementara belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai *Bride Trafficking* di India. *India Panel Code section 366* merupakan undang-undang yang membahas tentang *Bride Trafficking* namun implementasi dari undang-undang tersebut belum efektif terlihat dari jumlah korban *Bride Trafficking* meningkat dari tahun ke tahun.

Kasus kejahatan yang masih berkembang terjadi di India, menjadikan UNODC yang merupakan organisasi dibawah naungan PBB yang fokus untuk mencegah segala bentuk kejahatan memberikan perhatiannya untuk mencegah segala bentuk perdagangan manusia termasuk *Bride trafficking* di India. Peran UNODC dalam mencegah *Bride Trafficking* di India tidak lepas dari kerjasama dengan pemerintah India, NGO lokal dan masyarakat India. Pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari *Bride Trafficking* harus dimiliki setiap masyarakat India. Program 3P (Pencegahan, Perlindungan dan Penuntutan) merupakan program yang dilakukan UNODC dalam mencegah *Bride Trafficking* di India.

Ada beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi UNODC dalam mencegah *Bride Trafficking* di India. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari *Bride Trafficking* menjadikan masyarakat menganggap bahwa *Bride Trafficking* merupakan praktik yang biasa terjadi dan merupakan hal yang wajar. Kurangnya kapasitas juga dihadapi UNODC dalam mencegah *Bride*

Trafficking di India seperti kurangnya dana untuk NGO yang memiliki rumah singgah untuk korban yang selamat serta kekurangan tenaga medis didaerah pedesaan. Kurangnya pengawasan pemerintah India dalam masalah *Bride Trafficking* juga merupakan tantangan yang dihadapi UNODC. Kebijakan telah banyak dibuat namun implementasi dan pelaksanaannya belum efektif.

Fenomena-fenomena kejahatan terhadap wanita termasuk *Bride Trafficking* akan sulit dicegah jika seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah India tidak fokus dalam mencegahnya. India diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang kuat beberapa tahun yang akan datang sehingga ini dapat menjadi peluang untuk menjadikan India sebagai negara dengan kualitas kemanusiaan yang baik jika pemerintah India dapat mengalokasikan dana untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan bidang sosial budaya lainnya merata baik di kota maupun pedesaan. Pelaksanaan kebijakan dan penguatan serta pengawasan terhadap hukum yang melarang dan menghukum segala bentuk kejahatan harus ditingkatkan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Saeri, M. 2012, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional, Vol.3 No.2.

Buku

Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London: Allen&Unwid Ltd.

Eddyono, Supriyadi. 2005. *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*. Jakarta:

Dokumen Resmi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UNODC. 2008. *INDIA COUNTRY REPORT: To Prevent and Combat Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children and Women*. New Delhi. UNODC ROSA.

UNODC. 2013. *India Country Assessment Report: Current Status Of Victim Service Providers And Criminal Justice Actors On Anti Human Trafficking*. Diakses dari https://www.unodc.org/documents/southasia/reports/Human_Trafficking-10-05-13.pdf

UNODC. *Psychosocial Care For Women In Shelter Homes* diakses dari http://www.unodc.org/documents/southasia/Trainingmanuals/Psychosocial_care_for_women_in_shelter_homes.pdf

Artikel atau Media Massa

Bride-buying an old practice in north India. Diakses dari <http://www.tribuneindia.com/2003/20030818/main8.htm>

When a Bride-to-Be Is a Bride to Buy. Diakses dari

<https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2015-05-22/when-bride-be-bride-buy>

Internet

"Parents are victims of fraud who marry their daughters to the 'dilliwalahs' because they do not ask for dowry". Diakses dari

http://www.theeasternpost.org/print_news.php?n_id=992&of_id=5

39% of the world's illiterate adults are found in India. Diakses dari

<http://www.soschildrensvillages.org.uk/news/international-literacy-day/thirty-nine-percent-of-the-worlds-illiterate-adults-are-found-in-india>

Abduction of Women for Marriage Is on the Rise in India. diakses dari

<http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2015/08/20/abduction-of-women-for-marriage-is-on-the-rise-in-india/>

Bride Trafficking in India. Diakses dari www.dfn.org.uk/bridetrafficking

Bride Trafficking-Poor Paros of India, living sub-par lives. Diakses dari <http://www.indianmutinies.com/bride-trafficking-shafiq-rahman/>

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/362/jbptunikompp-gdl-arlindamay-18076-4-babii.pdf>

India: Psychosocial care for women in shelter homes - a dire need for trafficking survivors. Diakses dari

- <https://www.unodc.org/southasia/en/topics/frontpage/2012/January/psychosocial-care-for-women-in-shelter-homes.html>
- India: Significance of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) to address human trafficking.* Diakses dari <https://www.unodc.org/southasia/en/topics/frontpage/2011/june/significance-of-the-untoc-to-address-human-trafficking-interview-with-mr-g-k-pillai.html>
- Paro or Molki : An abusive word.* Diakses dari <http://www.empowerpeople.org.in/paro-or-molki--an-abusive-word.html>
- Prevention of Human Trafficking.* Diakses dari <https://www.unodc.org/southasia/en/topics/frontpage/2009/preventin-of-human-trafficking.html>
- Sex, lies, and a receipt: Bride trafficking lifts it head from under the veil.* Diakses dari <http://www.thealternative.in/society/sex-lies-and-a-receipt-bride-trafficking-lifts-it-head-from-under-the-veil/>
- Variation on slavery: bride trafficking, India.* 2011. Diakses dari <http://www.womensviewsonnews.org/2011/11/variation-on-slavery-bride-trafficking-india-2011/#sthash.bAVjL1QN.dpuf>
- World Day Against Trafficking in Persons.* diakses dari <http://www.unodc.org/endht/>